SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 395/500.2.1/XII/2025

TENTANG

PETA JALAN *(ROADMAP)* DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2027

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka II huruf c Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun peta jalan dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan *(Roadmap)* dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme Dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
6. Keputusan Bupati Dairi Nomor 175/500.2.1/VII/2025 Tahun 2025 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Dairi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan *(Roadmap)* dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Jalan *(Roadmap)* dan Rencana Aksi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2025-2027 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam mengambil langkah untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-masing Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 1 Desember 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI SEKRETARIAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
4. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 395/500.2.1/XII/2025
TENTANG PETA JALAN *(ROADMAP)* DAN RENCANA AKSI PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2027

I. PETA JALAN (ROAD MAP) PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025-2027

STRATEGI 4K	PROGRAM STRATEGIS	PROGRAM KERJA	*TIMELINE* TARGET			INDIKATOR KINERJA	*PERSON IN CHARGE* (PIC)
			2025	2026	2027		
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	1. Pengendalian dan Pengawasan LPG 3 kg dan BBM	12 (dua belas) kali (setiap bulan)	12 (dua belas) kali (setiap bulan)	12 (dua belas) kali (setiap bulan)	Terjaganya persediaan LPG 3 kg dan BBM Terjaminnya penjualan LPG 3 kg sesuai HET	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian
		2. Sidak Pasar dan Gudang Distributor dan Monitoring Pasokan Bahan Pokok Penting a. Sidak Pasar dan Gudang Distributor b. Pemantauan harga dan distribusi bahan pokok penting melalui aplikasi Sistem Harga	a. 4 (empat) kali b. Setiap hari melalui aplikasi	a. 4 (empat) kali b. Setiap hari melalui aplikasi	a. 4 (empat) kali b. Setiap hari melalui aplikasi	Frekuensi pelaksanaan kegiatan dan laporan Kestabilan harga bahan pangan menjelang hari besar keagamaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

		Pangan Komoditas Utama (SiHarapanku)					
		3. Pemantauan harga dan distribusi bahan pokok penting melalui *website : https://wasinflasi.kemendagri.go.id*	*Updating* data harian	*Updating* data harian	*Updating* data harian	Frekuensi pelaksanaan kegiatan dan laporan	Inspektorat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian
		4. Pemantauan harga kulakan (komoditi)	2 (dua) kali seminggu	2 (dua) kali seminggu	2 (dua) kali seminggu	Frekuensi pelaksanaan kegiatan dan laporan	Bagian Perekonomian
		5. Pemantauan harga bahan pokok di 15 (lima belas) kecamatan	1 (satu) kali seminggu	1 (satu) kali seminggu	1 (satu) kali seminggu	Frekuensi pelaksanaan kegiatan dan laporan	Camat Bagian Perekonomian
		6. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Pasar Murah, Pembentukan Toko Pantau Inflasi dan Perluasan Pembentukan Rumah Pangan Kita (RPK) a. Pasar Murah	a. Minimal 5 (lima) kali sebulan	a. Minimal 5 (lima) kali sebulan	a. Minimal 5 (lima) kali sebulan	Frekuensi pelaksanaan kegiatan dan laporan Kestabilan harga bahan pangan menjelang hari besar keagamaan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Bagian Perekonomian

		b. Gerakan Pangan Murah c. Pembentukan Toko Pantau Inflasi d. Perluasan Pembentukan Rumah Pangan Kita (RPK)	b. 4 (empat) kali setahun c. 1 Toko Inflasi d. 3 RPK	b. 4 (empat) kali setahun c. 1 Toko Inflasi d. 5 RPK	b. 4 (empat) kali setahun c. 1 Toko Inflasi d. 5 RPK		
		2. Bantuan Pangan bahan pokok penting	22.223 penerima	22.223 penerima	22.223 penerima	Jumlah Bantuan Pangan bahan pokok penting	Perum Bulog Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
KETERSEDIAAN PASOKAN	Peningkatan Produksi Pangan	Pengembangan Kawasan Pangan yang masuk dalam Program Strategis Daerah untuk komoditas padi, jagung, cabai merah dan bawang merah	-	Kawasan Produksi Jagung Kawasan Produksi bawang merah	Kawasan produksi cabai merah Kawasan Produksi bawang merah	Jumlah lahan produksi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan	-	Solar Dryer Dome 3 unit	Solar Dryer Dome 5 unit	Jumlah Solar Dryer Dome	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan	8 Kelompok	8 Kelompok	8 Kelompok	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Jumlah pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3 unit	3 unit	3 unit	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dirchabilitasi	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	45 unit	45 unit	45 unit	Jumlah kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
KELANCARAN DISTRIBUSI	Peningkatan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah	Pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antar daerah dan fasilitasi	Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMD, BUMDES,	Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMD, BUMDES,	Kerjasama antar pemerintah daerah, BUMD, BUMDES,	Adanya MoU / kerjasama	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

		kerjasama antar daerah untuk komoditas bahan pangan pokok	kelompok/wadah usaha masyarakat Pengembangan *business model* antara daerah surplus dan daerah defisit Komoditas cabai merah, beras, dan perikanan	kelompok/wadah usaha masyarakat Pengembangan *business model* antara daerah surplus dan daerah distribusi Komoditas cabai merah, beras, perikanan dan peternakan 1 MoU Antar Daerah	kelompok/wadah usaha masyarakat Pengembangan *business model* antara daerah surplus dan daerah distribusi Komoditas cabai merah, beras, kopi, perikanan dan peternakan 1 MoU Antar Daerah 1 MoU Antar Desa		Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bagian Perekonomian
KOMUNIKASI EFEKTIF	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Komoditas Pangan Strategis	Ketersediaan data neraca pangan di Kabupaten Dairi	Tersedianya Neraca Pangan atas dasar ketersediaan produksi	Tersedianya Neraca Pangan atas dasar ketersediaan produksi	a. Tersedianya Neraca Pangan atas dasar ketersediaan produksi b. Publikasi Neraca Pangan pada portal Kabupaten Dairi	Laporan	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Camat Bagian Perekonomian

	Peningkatan Publikasi Pengendalian Inflasi	Publikasi terkait dengan pengendalian inflasi	2 kali siaran/temu pers	2 kali siaran/temu pers	2 kali siaran/temu pers	Terlaksananya siaran/temu pers	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Bagian Perekonomian
	Memperkuat Koordinasi	Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media cetak dan elektronik	1 pojok informasi 2 kali sosialisasi	1 pojok informasi 2 kali sosialisasi	1 pojok informasi 2 kali sosialisasi	Laporan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Camat Bagian Perekonomian
	Penguatan kelembagaan	Peningkatan pemahaman peserta *capacity building* atau rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi	2 kali dalam setahun oleh Bank Indonesia 1 kali dalam setahun oleh bagian perekonomian	2 kali dalam setahun oleh Bank Indonesia 1 kali dalam setahun oleh bagian perekonomian	2 kali dalam setahun oleh Bank Indonesia 1 kali dalam setahun oleh bagian perekonomian	Laporan	Bagian Perekonomian

			1 kali dalam satu tahun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1 kali dalam satu tahun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 kali dalam satu tahun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1 kali dalam satu tahun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	1 kali dalam satu tahun oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1 kali dalam satu tahun oleh Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan		
		Peningkatan pemahaman peserta *workshop* Tim Pengendalian Inflasi	4 kali dalam setahun oleh BPS	4 kali dalam setahun oleh BPS	4 kali dalam setahun oleh BPS	Laporan	Bagian Perekonomian

II. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN DAIRI

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KELENGKAPAN	BAKU MUTU	
				WAKTU	*OUTPUT*
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1. Melaksanakan monitoring ketersediaan komoditi dan harga bahan pangan di tingkat kabupaten melalui website : panelharga.badanpangan.go.id 2. Melakukan kajian terhadap daerah (Desa/Kecamatan) yang dianggap berpotensi rawan pangan serta melakukan pemetaan musim tanam dan waktu panen sebagai upaya antisipasi daerah rawan pangan 3. Melakukan pendataan luas lahan tanam, prediksi waktu panen dan volume produksi komoditi jagung, bawang, cabai merah, cabai rawit, dan tomat 4. Melakukan persiapan persiapan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar desa yang surplus pangan ke desa defisit pangan	1. Menjamin validitas data hasil monitoring dan kajian 2. Menjamin ketepatan waktu pelaporan dan penyampaian laporan kepada Asisten Perekonnomian dan Pembangunan c.q. Kepala Bagian Perekonomian	1. Laporan hasil monitoring disertai dokumentasi pelaksanaan 2. Dokumen hasil kajian (*one sheet summary*)	1. Laporan hasil monitoring setiap akhir bulan (paling lama tanggal 28) 2. Dokumen hasil kajian (*one sheet summary*) setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (paling lama tanggal 28 akhir triwulan)	1. Tersedianya data keterediaan, distribusi dan harga bahan pangan 2. Tersedianya hasil kajian yang menjadi dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1. Melaksanakan pemantauan harga bahan pokok dan barang penting sesuai aplikasi SiHarapanku (Sistem Harga Pangan Komoditas Utama	1. Menjamin validitas data hasil monitoring 2. Menjamin laporan pada aplikasi	1. Laporan hasil monitoring disertai dokumentasi pelaksanaan	1. Laporan hasil monitoring setiap akhir bulan (paling lama tanggal 28)	1. Tersedianya data harga sesuai aplikasi SiHarapanku yang akurat

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KELENGKAPAN	BAKU MUTU	
				WAKTU	*OUTPUT*
	Sumatera Utara) Pemprov. Sumu dan SP2KP 2. Melaksanakan monitoring arus distribusi dan stok bahan pangan (Beras, Gula Pasir dan Minyak Goreng) di Pasar Modern, Grosir dan Usaha Dagang yang dianggap memiliki dampak dalam menjaga stabititas harga 3. Melakukan persiapan persiapan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar desa yang surplus pangan ke desa defisit pangan	SiHarapanku disampaikan juga kepada Sekretariat TPID 3. Menjamin ketepatan waktu pelaporan dan penyampaian laporan kepada Asisten Perekonnomian dan Pembangunan c.q. Kepala Bagian Perekonomian			2. Tersedianya data arus distribusi dan stok bahan pangan yang menjadi dasar perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Menfasilitasi persiapan kerjasama antar desa yang surplus pangan ke desa defisit pangan	1. Menjamin terlaksananya kerjasama antar desa berjalan dengan baik sesuai arahan Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Dokumentasi pelaksanaan fasilitasi koordinasi		1. Terlaksananya kerjasama antar desa untuk mendukung program TPID
CAMAT	1. Melakukan pendataan harga komoditas pokok dan barang penting setiap hari pasar di wilayah kerja	1. Menjamin validitas dan kelengkapan data 2. Menjamin ketepatan waktu pelaporan dan penyampaian laporan kepada Asisten Perekonnomian dan	1. Laporan hasil monitoring disertai dokumentasi pelaksanaan	1. Laporan disampaikan tepat waktu (paling lama 1 (satu) hari setelah hari pasar baik pelaporan secara *online* maupun *offline*	1. Tersedianya data harga di tingkat kecamatan yang akurat 2. Meningkatnya kualitas data harga yang digunakan dalam perumusan kebijakan

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KELENGKAPAN	BAKU MUTU	
				WAKTU	*OUTPUT*
		Pembangunan c.q. Kepala Bagian Perekonomian			pengendalian inflasi daerah
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Melakukan telaah persiapan anggaran untuk pengendalian inflasi	1. Menjamin tersedianya anggaran untuk pengendalian inflasi	1. Laporan keuangan		1. Tersedianya data anggaran/keuangan
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN DAERAH	1. Melakukan telaah / kajian dalam persiapan pelaksaaan pengendalian inflasi	1. Menjamin tersedianya kajian dalam persiapan pelaksaaan pengendalian inflasi	2. Laporan hasil kajian		1. Tersedianya data kajian dalam persiapan pelaksaaan pengendalian inflasi
BAGIAN PEREKONOMIAN	1. Melakukan rekapitulasi data harga / stok / arus distribusi dan menyusun interpretasi / analisis 2. Melakukan verifikasi data secara acak ke lokasi yang dianggap melaporkan data kurang / tidak valid 3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar desa 4. Memfasilitasi pelaksanaan *capacity building*, rapat teknis dan *workshop* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Dairi	1. Menjamin ketepakan waktu pelaporan dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1. Laporan hasil rekapitulasi 2. Laporan TPID per Triwulan 3. Laporan hasil verifikasi disertai dokumentasi pelaksanaan	1. Laporan hasil rekapitulasi disertai analisis paling lama setiap tanggal 28 2. Laporan TPID paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah masa triwulan berakhir 3. Laporan hasil verifikasi paling lama 1 (satu) hari setelah pelaksanaan	1. Tersedianya data rekapitulasi yang valid 2. Tersedianya laporan TPID untuk diserahkan ke TPID Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)

III. MATRIKS PENGENDALIAN INFLASI KABUPATEN DAIRI

4K	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN PENGENDALIAN INFLASI	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				TARGET 2026	PIC
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	**1. Melakukan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang**																																															
		1. 1. Sidak ke pasar, distributor, retail modern																																															Dinas Perindagkop
		1. 1. 1. Sidak di Kecamatan Sidikalang									■																																■						2 kali	
		1. 1. 1. Sidak di Kecamatan Sumbul									■																																■						2 kali	
		2. Melakukan Operasi Pasar /Gerakan Pangan Murah / Bantuan Pangan																																															
		2. 1. Operasi Pasar bersama Bulog																																														Bag. Perekonomian
		2. 1. 1. Operasi Pasar Kec.Pegagan Hilir			■				■									■					■																									6 kali	
		2. 1. 2. Operasi Pasar Kec.Siempat Nempu					■														■																											4 kali	
		2. 1. 3. Operasi Pasar Kec.Sidikalang															■		■						■																								12 kali	
		2. 1. 4. Operasi Pasar Kec.Sumbul			■				■				■		■		■				■				■																								6 kali	
		2. 1. 5. Operasi Pasar Kec.Silima Pungga-Pungga			■																■																												6 kali	
		2. 1. 6. Operasi Pasar Kec.Siempat Nempu Hulu							■																																								4 kali	
		2. 1. 7. Operasi Pasar Kec.Tigalingga			■				■	■							■					■			■	■																						6 kali	
		2. 1. 8. Operasi Pasar Kec.Parbuluan			■										■						■					■																							6 kali	
		2. 1. 9. Operasi Pasar Kec.Sitinjo				■			■								■				■																												6 kali	
		2. 1. 10 Operasi Pasar Kec.Siempat Nempu Hilir				■											■					■			■																								4 kali	
		2. 1. 11 Operasi Pasar Kec.Gunung Sitember																																															4 kali	
		2. 1. 12 Operasi Pasar Kec.Silahisabungan					■										■																																4 kali	
		2. 2. Pasar Murah Dinas Perindagkop																																															Dinas Perindagkop
		2. 2. 1. Pasar Murah Kec.Siempat Nempu Hulu							■				■																																			4 kali	
		2. 2. 2. Pasar Murah Kec.Sidikalang								■																																							6 kali	
		2. 2. 3. Pasar Murah Kec.Tigalingga								■																																							6 kali	
		2. 2. 4. Pasar Murah Kec.Siempat Nempu								■																																							4 kali	
		2. 2. 5. Pasar Murah Kec.Sumbul									■																																						6 kali	
		2. 2. 6. Pasar Murah Kec.Silima Pungga-Pungga									■																																						6 kali	
		2. 2. 7. Pasar Murah Kec.Tanah Pinem									■																																						6 kali	
		2. 2. 8. Pasar Murah Kec.Berampu									■	■																																					6 kali	
		2. 2. 9. Pasar Murah Kec.Parbuluan									■																																						6 kali	
		2. 2. 10 Pasar Murah Kec.Gunung Sitember										■																																					6 kali	
		2. 3. Gerakan Pangan Murah Dinas Pertanian KPP																																															Dinas Pertanian KPP
		2. 3. 1. Gerakan Pangan Murah di Kec Sidikalang (Lokasi Kantor Dinas Pertanian KPP)			■				■				■				■				■				■																							4 kali	
		2. 4. Pembentukan Toko Pantau Inflasi																																															Bag. Perekonomian
		2. 4. 1. Operasionalisasi Warung Tekan Inflasi Daerah (Wartekinda) di Pasar Sidikalang																																														1 Lokasi	

KETERJANGKAUAN HARGA	Stabilisasi Harga	2. 5. Perluasan Pembentukan Rumah Pangan Kita (RPK)		Bag. Perekonomian
		2. 5. 1. Koordinasi Pemerataan RPK di Kab. Dairi	5 RPK	
		2. 6. Bantuan Pangan Bahan Pokok Penting		Dinas Sosial
		2. 6. 1. Penyaluran Bantuan Pangan terhadap Keluarga Tidak Mampu	24.000 orang	
		3. Pengendalian dan Pengawasan LPG 3 KG dan BBM		
		3. 1. Pengendalian dan Pengawasan LPG 3 KG dan BBM		Dinas Perindagkop
		3. 1. 1. Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran LPG 3 KG dan BBM	Bulanan	
	Pemantauan Harga	**4. Melakukan Pemantauan Harga dan Stok untuk memastikan kebutuhan tersedia**		
		4. 1. Pemantauan harga dan distribusi bahan pokok penting melalui aplikasi Sistem Harga Pangan Komoditas Utama (SiHarapanku)		Dinas Perindagkop
		4. 1. 1. Analisa dan Pelaporan Harga Siharapanku	Harian	
		4. 2. Pemantauan harga dan distribusi bahan pokok penting melalui website : https://wasinflasi.kemendagri.go.id		Inspektorat
		4. 2. 1. Upload Data dan Dokumentasi pada website	Harian	
		4. 3. Pemantauan Harga Kulakan (komoditi)		Bag. Perekonomian
		4. 3. 1. Pemantauan Analisa Perkembangan Harga Kulakan Komoditi Pertanian	2 Kali per minggu	
		4. 4. Pemantauan Harga Bahan Pokok di 15 (lima belas) kecamatan		Bag. Perekonomian
		4. 4. 1. Koordinasi Analisa Perkembangan Harga Pengumpulan Data Harga	Harian	
KETERSEDIAAN PASOKAN	Peningkatan Produksi Pangan	**5. Pengembangan Kawasan Pangan yang masuk dalam Program Strategis Daerah untuk komoditas padi, jagung, cabai merah dan bawang merah**		Dinas Pertanian KPP
		5. 1. Kegiatan Pengembangan Kawasan Jagung	3 Lokasi	
		5. 2. Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah	5 Lokasi	
		6. Penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan		Dinas Pertanian KPP
		6. 1. Kegiatan Pembangunan Solar Dryer Dome	1 unit	
		7. Melaksanakan Pencanangan gerakan menanam		Dinas Pertanian KPP
		7. 1. Gerakan menanam di Kec Tanah Pinem	2 ha	
		7. 2. Gerakan menanam di Kec Siempat Nempu Hulu	2 ha	
		7. 3. Gerakan menanam di Kec Sumbul	2 ha	
		8. Menjaga Pasokan Bahan Pangan Pokok	Laporan Bulanan	Dinas Pemdes
		8. 1. Kegiatan Ketahanan Pangan Desa di Desa Pandiangan, Kec Lae Parira	1 Kegiatan	
		8. 2. Kegiatan Ketahanan Pangan Desa di Desa Sigambir-gambir, Kec Siempat Nempu Hulu	1 Kegiatan	
	Pengelolaan Perikanan Budidaya	**9. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan**		Dinas Pertanian KPP
		9. 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas	8 Kelompok	
	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**10. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi**		Dinas Pertanian KPP
		10. 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Efektif dan Efisien	1 Kegiatan	
		11. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Dinas Pertanian KPP
		11. 1. Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Kegiatan	

KETERSEDIAAN PASOKAN	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	**12. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**		Dinas Pertanian KPP
		12.1. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3 unit	
	Penyuluhan Pertanian	**13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa**		Dinas Pertanian KPP
		13.1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	45 unit	
KELANCARAN DISTRIBUSI	Peningkatan dan Penguatan Kerja Sama Antar Daerah	**14. Berkoordinasi dengan Daerah Penghasil Komoditi**		
		14.1. Pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerjasama antar daerah untuk komoditas bahan pangan pokok	1 KAD	Bappeda Litbangda
		14.2. Pengembangan model bisnis kerjasama perdagangan antar Desa dan fasilitasi kerjasama antar Desa untuk komoditas bahan pangan pokok	2 KADes	Dinas Pemdes
	Intervensi Melalui Anggaran Daerah	**15. Memberikan bantuan transportasi dari APBD (Dianggarkan pada P APBD 2026)**		Dinas Perhubungan
		15.1. Subsidi transportasi untuk pengendalian inflasi	1 Kegiatan	
		16. Merealisasikan BTT untuk pengendalian inflasi (Ketika dibutuhkan)		BKAD
		16.1. Penggunaan BTT untuk pengendalian inflasi	1 Kegiatan	
KOMUNIKASI YANG EFEKTIF	Peningkatan Kualitas Data dan Informasi Komoditas Pangan	**17. Ketersediaan data neraca pangan di Kabupaten Dairi**		Dinas Pertanian KPP
		17.1. Penyediaan Data Neraca Pangan Daerah	Bulanan	
		17.2. Analisa Data Neraca Pangan Daerah	Bulanan	
	Peningkatan Publikasi Pengendalian Inflasi	**18. Publikasi terkait dengan pengendalian inflasi**		Dinas Kominfo
		18.1. Publikasi Kegiatan / Dokumen Pengendalian Inflasi Daerah	Bulanan	
	Memperkuat Koordinasi	**19. Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media cetak dan elektronik**		Dinas Kominfo
		19.1. Rilis Siaran Pers / Temu Pers	2 kali setahun	
	Penguatan kelembagaan	**20. Peningkatan pemahaman peserta capacity building atau rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi**		Bagian Perekonomian
		20.1. Rakor Kemendagri dan Rapat Teknis Mingguan	Mingguan	
		20.2. Rakor dan Evaluasi Semesteran	2 Kali setahun	
		20.3. Workshop Pengembangan Kapasitas TPID dari BPS	Bulanan	
		20.4. Workshop Pengembangan Kapasitas TPID dari BI	2 kali setahun	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA